

Demokrat Nilai Gibran Pantas Maju Pilgub DKI

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat menilai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, pantas maju Pilgub DKI Jakarta 2024.

Demokrat pun membuka peluang kolaborasi kadernya dengan Gibran.

"Kalau soal pantas tentu pantas mungkin ya," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, saat dihubungi, Senin (13/9).

Andi Arief menilai siapa pun pantas menjadi kepala daerah. Meski demikian, menurutnya, belum tepat saatnya untuk membicarakan hal tersebut saat ini.

"Siapa pun bisa menjadi kepala daerah zaman demokrasi, apakah sudah pantas dibicarakan sekarang? Rasanya momennya belum pas," katanya.

Meski begitu, Andi Arief menyebut Demokrat juga sudah mempersiapkan kadernya untuk Pilgub DKI Jakarta.

Menurutnya, terbuka kemungkinan kolaborasi antara kader Demokrat dan Gibran.

"Demokrat sendiri sudah mempersiapkan banyak kader utama untuk Pilkada DKI 2024. Apakah nanti akan

berkolaborasi atau tidak? Kita lihat nanti," ujarnya.

Sebelumnya, PWNU DKI mengundang Gibran Rakabuming dalam acara donor darah.

Acara tersebut juga dihadiri Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

PWNU DKI memanggil Gibran dengan 'Gus Gibran'. Sebutan 'Gus Gibran' itu dilayangkan pertama kali oleh Ketua PWNU DKI Samsul Ma'arif serta Ketua Satgas Donor Darah dan Plasma Konvalans PWNU DKI KH Asyik Samsul Huda ketika Gibran menghadiri acara donor darah PWNU DKI itu.

Dihubungi terpisah, Samsul berpendapat 'Gus Gibran' sudah waktunya memimpin cakupan wilayah yang lebih besar lagi. Jakarta, terang Samsul, dinilai jadi wilayah yang cocok untuk Gibran.

"Layak memimpin Jakarta," ujar Samsul Ma'arif kepada detikcom, Sabtu (11/9).

Menurutnya, panggilan Gus Gibran memiliki arti tersendiri.

"(Arti Gus Gibran) generasi muda pemimpin. Generasi muda sudah waktunya menjadi pemimpin," jelas Samsul.

"(Sebutan Gus Gibran) spontan saja," katanya. ● yan

Pemprov DKI Targetkan Seluruh Sekolah Gelar PTM Mulai Akhir Tahun

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan seluruh sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) mulai akhir tahun ini. Saat ini Pemprov DKI masih terus mengevaluasi pelaksanaan uji coba PTM di 610 sekolah.

"PTM kan masih berlangsung. Kita lihat perkembangannya, yang 610 sekolah nanti akan bertambah lagi menjadi 1.500, dan seterusnya. Diusahakan di akhir tahun ini, mudah-mudahan bisa seluruhnya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza), Senin (13/9).

Menurut Ariza, kesuksesan penyelenggaraan PTM tergantung dari ketertiban pihak sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Jika ditemukan ada sekolah yang melanggar prokes maka PTM dihentikan sementara.

"Semua situasinya sangat dinamis, bergerak ya. Kalau ada yang membandel melanggar (prokes), ya ditutup sementara. Tapi kalau semua semakin baik dan disiplin tentu semakin baik dan semakin dilonggarkan seiring

dengan peningkatan vaksin dan disiplin masyarakat dan penurunan dari pada Covid itu sendiri," bebernya.

Ariza membeberkan, alasan PTM harus bisa segera diterapkan ke seluruh sekolah di Jakarta adalah untuk mengejar materi belajar siswa. Sistem tatap muka di sekolah dinilai jauh lebih efektif dibandingkan sekolah daring yang dilaksanakan siswa selama pandemi Covid-19.

"Pendidikan anak-anak perlu dikejar. Selama masa pandemi, teman-teman tahu semua, anak-anak hampir 1,5 tahun lebih sekolah di rumah. Secara online kan lebih berat pemahaman, pengertian, dan ilmunya. Tidak sebaik di sekolah, tidak seberkualitas tatap langsung dengan para pendidik atau guru. Perlu ada percepatan untuk mengejar ketinggalan," jelasnya.

Seperti diketahui, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mulai melaksanakan PTM pada 30 Agustus 2021 lalu.

Sebanyak 610 sekolah telah mengikuti asesmen dan pelatihan untuk menggelar kegiatan belajar mengajar di sekolah meski secara terbatas. ● yan

Kantor Wali Kota Jaksel Siapkan 400 Vaksin Pfizer Dosis Pertama



Vaksinasi di Pemkot Jaksel

JAKARTA (IM) - Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan membuka sentra vaksinasi massal gratis untuk masyarakat umum hingga 17 September 2021 mendatang.

Kepala Pusat Kesehatan Pegawai (PKP) Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, sekaligus vaksinator, dokter Laura mengatakan setiap harinya, Pemkot Jakarta Selatan menyediakan sebanyak 400 dosis vaksin Pfizer dosis satu untuk pelajar dan warga masyarakat umum maupun warga yang tinggal di Jakarta Selatan hingga usia 60 tahun.

"Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Kantor Pemkot Jaksel berjalan tertib aman dan lancar. Respons warga masyarakat umum, khususnya warga Jakarta Selatan pun sangat antusias dengan adanya vaksin jenis Pfizer ini. Hingga siang ini saja, sudah sebanyak 298 orang disuntik vaksin," jelas Dokter Laura di Lantai 3, Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (13/9).

Lebih lanjut, dokter Laura mengimbau agar masyarakat umum dan pelajar yang belum divaksin untuk segera mendaftar dan ikut vaksinasi dengan apa pun jenis dan merk vaksinnya.

"Vaksinasi yang baik itu adalah vaksinasi yang ada pada saat di depan kita. Jangan ditunda-tunda. Sebab jika vaksin ditunda-tunda akan lebih berisiko, apalagi kalau tidak vaksin. Mumpung sedang difasilitasi oleh pemerintah secara gratis, dengan vaksinasi lengkap mudah-mudahan Covid-19 segera berakhir," pungkask dokter Laura. ● ber

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



RENCANA PENAMBAHAN PTM DI JAKARTA

Petugas kebersihan membersihkan akrilik pembatas meja belajar di SMA 81 Jakarta Timur, Senin (13/9). Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta berencana menambah jumlah sekolah yang menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebanyak 1.500 pada (27/9).

Massa Geruduk Gedung DPRD DKI, Tuntut Formula E Dibatalkan

Masa pendemo meyakini pandemi Covid-19 akan terjadi selama bertahun-tahun. Semestinya dana triliunan diperuntukkan buat pemulihan ekonomi. Mereka juga merasa kecewa terhadap DPRD DKI yang mengesahkan anggaran Formula E pada 2019.

JAKARTA (IM) - Massa demonstran mengatasnamakan 'Aksi Jakarta Bergerak' menggelar aksi di DPRD DKI Jakarta, Senin (13/9). Mereka menuntut agar Formula E di Jakarta dibatalkan.

Pantauan di lokasi, sekelompok orang datang dari arah Jl MH Thamrin menuju kantor DPRD DKI Jakarta di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aparat gabungan polisi dan Satpol PP bersiaga di lokasi. Mereka tampak membawa 1 unit mobil komando disertai poster bertuliskan "TOLAK FORMULA E, WARGA PERLU MAKAN BUKAN BALAPAN!". Ada pula massa yang membawa bendera Merah

Putih serta rangkaian bunga di lokasi demo.

"Yang kami tuntut terkait rencana event balapan mobil Formula E yang akan dilakukan Pemprov DKI dan Gubernur Anies. Kami merasa sebagai rakyat kecewa, marah dan sakit hati karena ada uang rakyat begitu besar Rp 1 triliun terbuang percuma pada saat ini," kata Koordinator Lapangan Aksi Jakarta Bergerak, Siska saat ditemui di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Senin (13/9).

Siska meyakini pandemi Covid-19 akan terjadi selama bertahun-tahun. Semestinya dana triliunan bisa diperuntuk-

kan buat pemulihan ekonomi. Dia turut mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap DPRD DKI yang mengesahkan anggaran Formula E pada 2019.

"Pandemi masih panjang, perlu perlu makan. Bukan masalah balapan mobil yang diutamakan!" ujar Siska.

"Yang membuat kami sedih disahkannya anggaran itu oleh DPRD. Kami kecewa memilih kalian. Itu jadi introspeksi kami di pemilihan berikutnya," sambungnya.

Tak butuh waktu lama, polisi langsung meminta massa aksi segera bubar. Polisi beralasan Jakarta masih memberlakukan PPKM level.

"Yang tak berkepentingan, silakan membubarkan diri! Jakarta masih PPKM," ujar polisi di lokasi.

Namun, massa tetap berupaya mengirimkan perwakilan untuk melakukan audiensi. Akhirnya, 7 perwakilan massa diperkenankan masuk untuk melakukan audiensi di DPRD DKI. Sedangkan sisanya diminta membubarkan diri ke arah Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Salah Gunakan Wewenang

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengkritik rencana perhelatan Formula E di Ibu Kota yang didengungkan Gubernur Anies Baswedan.

Merujuk pada surat Dinas Pemuda dan Olahraga DKI, dia menilai, Gubernur DKI Anies Baswedan berpotensi menyalahgunakan wewenangnya.

Sebab, Anies telah menekan kerja sama dengan Formula E Operation (FEO) agar ajang balap mobil listrik internasional itu digelar di Jakarta selama lima tahun berturut-turut.

Sementara pemerintah mengatur agar penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melebihi akhir tahun jabatan kepala daerah.

"Sangat kuat ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh gubernur," kata dia dalam pesan tertulisnya, Senin (13/9).

Sebelumnya, beredar surat dari Dispora kepada Anies mengenai laporan atas rencana kegiatan Formula E pada 15 Agustus 2019. Sumber menyebut surat itu adalah laporan terhadap draft nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) Formula E.

Satu dari lima poin laporan Dispora adalah soal kewajiban membayar dana Formula E selama lima tahun. Dispora mengingatkan Anies bahwa jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tak bisa melebihi masa jabatan kepala daerah.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 92 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal itu mengatur bahwa jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala

daerah berakhir.

Aturan ini dikecualikan jika kegiatan tahun jamak tersebut merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ini sudah diingatkan dalam surat Kadispora, tetapi diabaikan," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, 7 fraksi DPRD DKI Jakarta sepakat menolak usulan interpelasi fraksi PDIP dan PSI yang ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penolakan dari 7 fraksi ini diketahui usai adanya pertemuan Anies bersama ke-7 fraksi DPRD DKI. Foto pertemuan Anies dengan tujuh fraksi DPRD DKI itu beredar di media sosial.

Pertemuan itu digelar di rumah dinas Anies, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/8) malam. Ketua Fraksi yang hadir adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan pihaknya bersikeras mengajukan interpelasi meski Gerindra mengklaim 73 anggota DPRD menolak. Gembong menjelaskan alasannya tetap kekeh mengajukan interpelasi terhadap Anies. Dia mengaku heran dengan pemikiran Pemprov DKI yang masih memaksa gelaran Formula E, di tengah situasi pandemi saat ini.

"Pertanyaannya apakah dalam situasi pandemi ini gelaran Formula E dibutuhkan rakyat Jakarta? Kenapa tidak ditunda tahun 2023? Di saat situasi Jakarta yang belum pulih, rasanya kok tidak elok penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala

BANTU PENGUSAHA KECIL HADAPI DAMPAK COVID-19

Hipmi Jaya Luncurkan Program UMKM

JAKARTA (IM) - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, komposisi usaha mikro dan kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Hasil survei dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan, pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa di antaranya sampai harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.

Sebagai pelaku-pelaku utama ekonomi di DKI Jakarta, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya menyadari, perekonomian kedepan masih sulit sampai meredanya wabah Covid-19. Terlebih, banyak anggota Hipmi Jaya sendiri yang terdampak dari pandemi.

Sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap anggota Hipmi Jaya, UMKM dan masyarakat lainnya yang terdampak pandem Covid-19, Hipmi Jaya membuat Program UMKM (Untuk Mereka Kita Membantu). Program ini hadir untuk membantu UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner dan kriya dengan cara, membeli produk mereka dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tahap pertama, program ini telah membagikan paket sembako, makanan siap saji kepada pemulung, tukang ojek, dan masyarakat umum lainnya yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara.

Untuk tahap kedua, Hipmi Jaya bekerja sama dengan KitaBisa kembali mengulirkan program UMKM tersebut di Kantor Walikota Jakarta Selatan secara simbolis. Bantuan yang berikan kepada UMKM dan masyarakat yang membutuhkan dengan nilai Rp100 juta atau sekitar 4.000 paket bantuan yang diserahkan oleh Ketua Umum Hipmi Jaya, Sona Maesana dan diterima oleh Pelaksana tugas (Plt) Walikota Jakarta Selatan, Isnawa Adji.

Selanjutnya bantuan tersebut akan didistribusikan ke 8 Kecamatan yang berada di wilayah Jakarta Selatan yaitu Jagakarsa, Pasar Minggu, Mampang, Pancoran, Setia-

budi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru dan Pesanggrahan. Bantuan juga disalurkan untuk Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya Tebet, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama Tebet dan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Margaguna Cilandak.

"Program ini hadir untuk membantu teman-teman pengusaha UMKM Kuliner dan Kriya yang akan kami beli produk nya dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan" kata Muhammad Arif, ketua Program UMKM Hipmi Jaya.

Plt Walikota Jakarta Selatan, Isnawa Adji mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Hipmi Jaya yang untuk kesekian kalinya membantu dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

"Kami tahu, para pengusaha muda yang tergabung di HIPMI sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini, tetapi di tengah kondisi yang sulit tersebut, masih memikirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan". Atas nama warga Jakarta Selatan, kami mendoakan semoga Hipmi Jaya semakin sukses dan bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat," pungkasnya. ● yan

"Kami tahu, para pengusaha muda yang tergabung di HIPMI sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini, tetapi di tengah kondisi yang sulit tersebut, masih memikirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan". Atas nama warga Jakarta Selatan, kami mendoakan semoga Hipmi Jaya semakin sukses dan bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat," pungkasnya. ● yan

Ekonomi Harus Tumbuh Selaras dengan Pengawasan Covid-19

KOTA BEKASI (IM) - Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi menerima penghargaan Top Pembina BUMD 2021 di ajang Top BUMD Awards, Senin (13/9).

Acara yang berlangsung saat apel Senin pagi di Stadion PCB itu dihadiri wakil wali kota dan jajaran beserta TWUP4.

Rahmat menyampaikan, penghargaan itu diraih atas hasil kerja yang nyata.

"Penghargaan ini diraih bukan secara cuma-cuma, melainkan ada proses kerja nyata di baliknya," sebutnya dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Senin (13/9).



Pemerintah Kota Bekasi saat apel Senin pagi di Stadion PCB, Senin (13/9). pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi harus terus digerus apa- lagi masih saat pandemi. Terlebih lagi, tambahnaya, Kota Bekasi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan.

Pemkot Bekasi Buka Gerai Vaksinasi di Mall-mall

KOTA BEKASI (IM) - Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 443.1/1906/SET.COVID19, Senin (13/9).

SE tersebut adalah tentang Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 pada Gerai Vaksinasi di pusat perbelanjaan atau mall di Kota Bekasi.

Vaksinasi tersebut di-

maksudkan guna mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dalam rangka mengurangi penularan Virus Covid-19 dan untuk menurunkan angka kesakitan serta kematian akibat Covid-19.

Dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Senin (13/9) disebutkan, pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 tersebut dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 30 September 2021 di 17 titik lokasi di Kota Bekasi. ● mdl

"Tugas Pemkot Bekasi harus menaikkan daya jual beli di tengah-tengah masyarakat agar ekonomi terus meningkat," imbuhnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan pengawasan penanganan Covid-19 yang tidak boleh luntur.

Menurutnya, lima hari terakhir di bulan September, kasus terkonfirmasi sudah 0,21% serta bed occupancy rate (BOR) sudah tinggal 6,2%.

Selanjutnya, kata dia lagi, camat dan lurah mengingatkan dan memertahankan pengawasan di wilayah. "Ini sudah melewati ambang batas yang luar biasa, malah seharusnya kita ada di PPKM level 1," sebutnya. ● mdl